

## **ABSTRAK**

### **Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance***

**Oleh:**

**Riki Ismail Barokah  
2.216.1.025**

Tujuan dari ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan social budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan ADD hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.

Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut untuk mewujudkan *Good Governance*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang jelas dengan meneliti data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan otonomi daerah di desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, khususnya berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis secara yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian tesis ini, bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. Melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Faktor- faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut : Kebijakan Pemerintah Desa Kurang Jelas, kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan lain-lain. Kurangnya Informasi, kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD nya,. Dengan kata lain pelaksanaan ADD di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Sumber Daya Manusia, dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa factor penghambat Kebijakan.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.



## ABSTRACT

*The purpose of ADD is to finance the Village Government program in carrying out government activities and community empowerment, so that income distribution, employment opportunities and business opportunities for rural communities can be improved. This is because the lack of empowerment done to the community and the lack of socio-cultural development is done because that is visible from the implementation of ADD is only the procurement of goods and the provision of fertilizer planting.*

*Based on the background, the following problem identification is obtained: How is the implementation of the responsibility of the Village Head in the management of village finances in Talagasari Village, Kadungora District, Garut Regency. How are the constraints and solutions for the implementation of the accountability of the Village Head in managing village finances in Talagasari Village, Kadungora District, Garut Regency to realize Good Governance.*

*The research method used is descriptive analysis to obtain a clear picture by examining secondary data. Secondary data is obtained through literature study of primary legal materials and secondary legal materials relating to village autonomy in village governance management, particularly in relation to the performance of Village Owned Enterprises based on Law No. 6 of 2014 on Villages. Data obtained from this study, analyzed by normative juridical with the approach of legislation.*

*The result of this thesis research, that the responsibility of Village Head in Village Head Village Financial Management is the holder of power of village finance management. In exercising the power of village financial management, the village head empowers some of his power to the village apparatus.*

*The Village Head as the holder of the village financial management authority as referred to in paragraph (1), has the authority to: a. establish a policy on the implementation of APBDesa; b. establishing PTPKD; c. establishing officers who collect village revenues; d. approving the expenditure on activities specified in the APBDesa; and e. carry out actions that result in expenditure at the expense of APBDesa. Factors that hamper the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Talagasari Village, Kadungora Sub-district, Garut Regency: Village Government Policy is Less Clear, government policy in general can be interpreted all things related to government decisions, whether in the form of program, regulations and others. Lack of Information, lack of directional distribution of ADD so far can be seen from the reality that most of the Village allocates its ADD budget for the improvement / improvement of physical roads, buildings, whose contribution is low in encouraging the community empowerment and very few Villages that direct the ADDnya budget. In other words the implementation of ADD in the Village TalagasariKadungora District Garut. Human Resources, in relation to resources with the implementation of ADD, there are several factors inhibiting the Policy.*

*Keywords: Management of Village Finance, Village and Community Welfare.*